

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian, sumber utama pangan maupun sebagai penopang pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari : (1) cakupan komoditasnya, meliputi berbagai jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim, (2) hasil produksinya, merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada dasarnya telah melekat adanya keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan sub-sektor lainnya, dan (3) pengusahaannya, sebagian besar dikelola/dikerjakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di berbagai daerah (Goenadi, 2005).

Sektor perkebunan merupakan sektor yang berperan sebagai penghasil devisa Negara pada tahun 2015 mencapai US\$ 45,54 milyar atau setara dengan Rp.546,42 triliun (asumsi 1 US\$ = Rp. 12.000,-), salah satu komoditas perkebunan penghasil devisa adalah komoditas kopi. Pada tahun 2015, tercatat nilai transaksi penjualan kopi Indonesia mencapai US \$814.311.000. Luas areal perkebunan kopi Indonesia pada tahun 2015 mencapai 1,29 juta ha, sebesar 1.24 juta merupakan perkebunan rakyat, terdiri atas 1,04 juta kopi robusta dan 251 ribu ha kopi arabika. Dan penyerapan tenaga kerja mencapai 2 juta orang pada tahun 2015 (Ditjenbun, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan di dalam pasal 3 memuat beberapa wewenang dalam penyelenggaraan perkebunan yang dapat diketahui bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan, meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Setiap Negara mempunyai destinasi perkebunan yang dituntut untuk mampu menunjukkan posisi daya saing yang unggul agar dapat memudahkan kegiatan promosi dan pemasaran yang lebih efektif di pasar global.

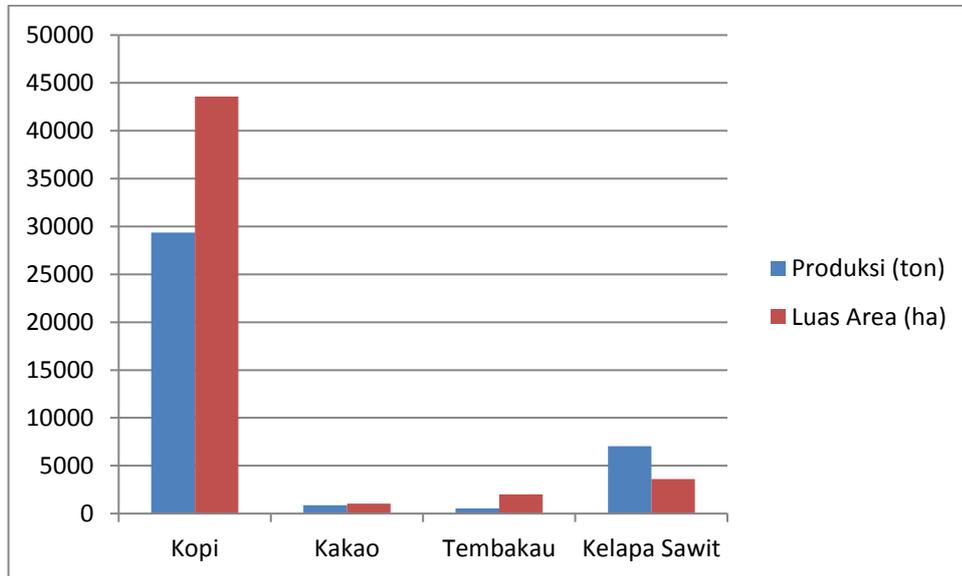
Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan nasional yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut dapat berupa pembukaan kesempatan kerja, serta sebagai sumber pendapatan petani. Pengelolaan komoditas kopi telah membuka peluang bagi lima juta petani. Disamping itu juga tercipta lapangan kerja bagi pedagang pengumpul hingga eksportir, buruh perkebunan besar dan buruh industri pengolahan kopi (Ratnandari dan Tjokrowinoto, 1991).

Rudi (2016) mengatakan sektor pertanian menjadi pilihan penting karena posisinya yang berdasar sumber-sumber sendiri (*domestic resources based*) dan bertitik sentral pada rakyat dengan sekaligus mengutamakan

kepentingan rakyat. Berbagai hasil pembangunan terutama yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat perkebunan seperti yang diharapkan pada pengembangan perkebunan rakyat baik melalui pola PIR, UPP maupun pola swadaya petani perkebunan, baru menikmati pendapatan produksi (*off farm*) yang umumnya mempunyai margin pendapatan yang lebih besar, lebih banyak dinikmati oleh pengusaha besar, tetapi belum banyak dinikmati oleh petani. Tantangan perkebunan kedepan adalah peningkatan daya saing bukan saja Negara produsen di wilayah tropis, tetapi juga dengan negara maju yang terus menerus melakukan penelitian untuk menghasilkan produk perkebunan. (Admaizon, 2004).

Berbicara mengenai perkebunan, Kabupaten Bener Meriah dengan luas 1.919,69 km² memiliki potensi yang cukup besar di bidang perkebunan kopi, dimana perkebunan kopi merupakan andalan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dengan luas wilayah perkebunan mencapai 50.233 Ha. Adapun luas lahan perkebunan, jenis tanaman, produksi dan luas area perkebunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

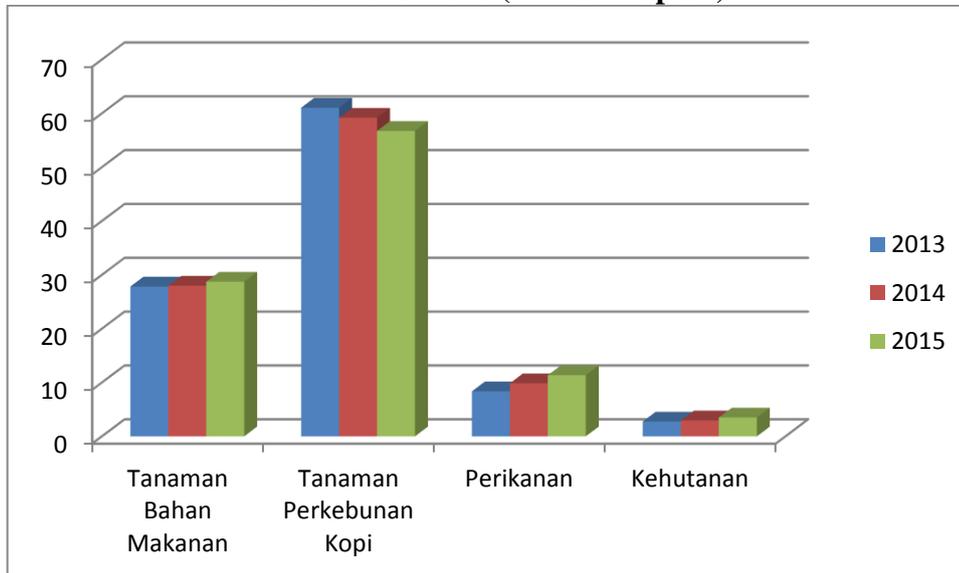
Gambar 1.1
Jenis Tanaman, Produksi, dan Luas Area Perkebunan
Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2015



Sumber : BPS Bener Meriah 2015 (data di olah)

Dari gambar diatas disimpulkan, luas lahan dan produksi perkebunan terbesar di Kabupaten Bener Meriah di tahun 2015 adalah Tanaman Kopi, dengan luas 43.565 ha dan produksi sebesar 29.357 ton untuk perkebunan kopi, sementara tanaman Kakao dengan luas hanya 1.053 ha dan produksi 876 ton, Tembakau 2.004 ha dan produksi 556 ton, Kelapa Sawit 3.611 ha dan produksi 7.046 ton berada dibawah tanaman kopi. Dan perkebunan kopi ini merupakan subsektor yang mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah pendapatan asli daerah yang tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) data dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2
Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian
Tahun 2013-2015 (Milliar Rupiah)



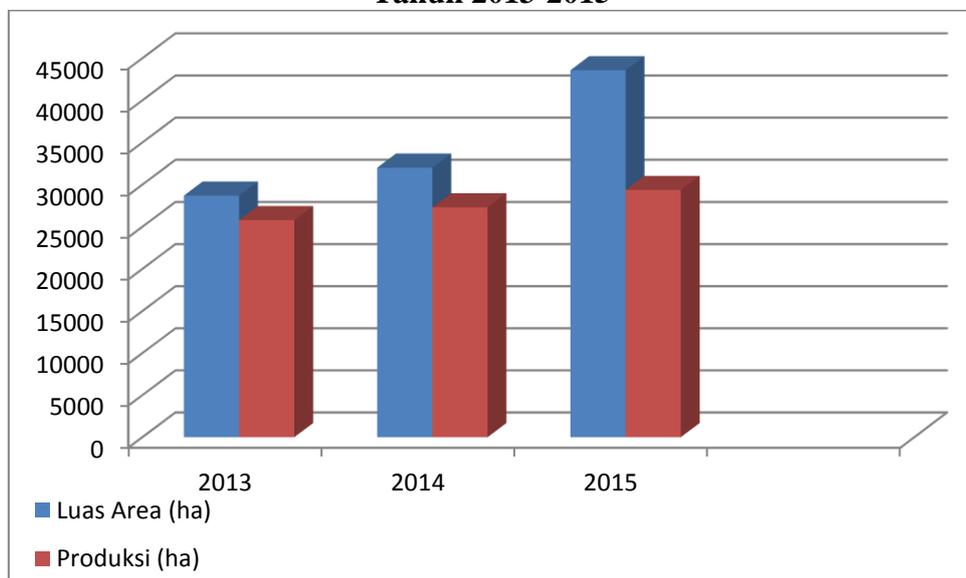
Sumber : BPS Bener Meriah 2015 (data di olah)

Dari gambar diatas dapat disimpulkan, dari segi nilai berdasarkan harga yang berlaku, perkebunan kopi pada tahun 2015 menyumbang Rp.807 millyar atau 56 % dari nilai hasil keseluruhan PDRB pertanian yaitu sebesar Rp.1,423 triliun. Didapatkan jumlah pendapatan dari sector pertanian yang tertinggi adalah produksi dari perkebunan kopi yaitu senilai Rp.807 miliyar ditahun 2015, tetapi perjalanan perkebunan kopi tidak mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Bahkan jika di persentasikan dari keseluruhan pendapatan pertanian, perkebunan kopi tidak mengalami peninkatan dibandingkan dengan tanaman bahan makanan, perikanan dan kehutanan yang selalu mengalami peninkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 Tanaman Perkebunan Kopi menyumbang 61,04% dengan total pendapatan PDRB tahun 2013 sebesar Rp 1,311 triliun, sementara di tahun 2014

mengalami penurunan dengan menyumbang sebesar 59,18% dengan total pendapat PDRB tahun 2014 sebesar Rp 1,360 triliun dan ditahun 2015 mengalami penurunan lagi dengan menyumbang sebesar 56,73% dengan total pendapatan PDRB tahun 2015 sebesar Rp 1,423 triliun. Sedangkan Tanaman Bahan Makanan, Perikanan dan Kehutan tiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap pertumbuhan pendapatan untuk PDRB daerah tersebut.

Sementara hasil produksi kopi di Kabupaten Bener Meriah juga tidak mengalami peningkatan yang begitu signifikan, meskipun luas lahan kopi mengalami peningkatan namun produksinya tidak sejalan dengan lahan yang tiap tahunnya meningkat, data dapat dilihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.3
Luas Lahan Perkenunan Kopi dan Produksi Kopi
Tahun 2013-2015



Sumber : BPS Bener Meriah 2016 (data di olah)

Dari gambar diatas menyimpulkan bahwa luas area perkebunan kopi dan produksi kopi tiap tahunnya mengalami peningkatan, luas area di tahun

2013 sebesar 28.867 ha, tahun 2014 meningkat menjadi 32.000 ha dan tahun 2015 meningkat lagi menjadi 43.565 ha. Sementara untuk produksi kopi di tahun 2013 sebesar 25.775 ton, tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 27.294 ton dan di tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 29.357 ton. Akan tetapi peningkatan produksi kopi tidak sejalan dengan peningkatan luas perkebunan kopi yang begitu signifikan.

Pengembangan perkebunan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan hidup petani disertai dengan kualitas kehidupan mereka melalui pola peningkatan mutu dan produksi hasil pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat dan daerah. Disini peran pemerintah khususnya Dinas Perkebunan dan Kehutanan sangat dibutuhkan terhadap pengembangan sektor perkebunan untuk ditingkatkan kearah yang lebih baik, karena pada kenyataannya sektor perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Dari hasil proyeksi penduduk yang dikeluarkan BPS Bener Meriah tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah sebesar 128.538 jiwa. Komposisi penduduk di kabupaten Bener Meriah sebagian besar berprofesi sebagai petani yaitu 84.533 jiwa atau 66% dari jumlah penduduknya, jumlah yang lebih dari setengah jumlah penduduk di daerah tersebut menggantungkan nasib perekonomiannya dari perkebunan kopi. Perkebunan Kopi di Kabupaten Bener Meriah merupakan tulang punggung mata pencaharian masyarakatnya, dengan harapan pemerintah mampu untuk

mengembangkan potensi perkebunan yang dimiliki untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakatnya dan mensejahterakan masyarakatnya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal itu sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8, tentang kebijakan penataan ruang disebutkan :

- 1) Pengembangan dan penataan pusat kegiatan agribisnis, agrowisata dan permukiman
- 2) Pengembangan tata kelola pertanian, perkebunan, dan pariwisata
- 3) Peningkatan produktifitas lahan, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Dan selanjutnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 04 tahun 2013 pasal 8, adapun program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap pengembangan perkebunan kopi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi
 - a. Rehabilitasi Tanaman Kopi
 - b. Pengadaan Bibit Kopi
- 2) Meningkatkan penerapan teknologi perkebunan kopi
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan kopi tepat guna

b. Fasilitas Jaminan Mutu

Dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kopi oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah, program dan kegiatan yang di jalankan pemerintah mengalami berbagai kendala sehingga menimbulkan presepsi di kalangan masyarakat Bener Meriah ada yang beranggapan positif dan ada pula yang beranggapan negatif terhadap pelaksanaan kebijakan untuk pengembangan perkebunan kopi.

Seperti permasalahan dan isu-isu pokok yang sedang berkembang, Mustafa (2016) mengatakan pemerintah kurang memperhatikan para petani dalam meningkatkan produksi, kurangnya pembinaan terhadap koperasi yang merupakan wadah petani kopi yang membuat harga jual kopi dari petani ke koperasi dan toke tidak stabil, rendahnya peran penyuluhan mendukung budidaya kopi yang berakibat kurangnya informasi yang di dapat oleh para petani baik itu masalah harga maupun tatacara budidaya kopi yang efektif dan efisien, kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap agribisnis kopi, dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga motivasi petani kopi untuk mengelola kebun kopi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali pelaksanaan kebijakan pengembang perkebunan kopi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana pelaksanaan pengembangan perkebunan kopi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan

pengembangan perkebunan kopi sehingga memahami apa saja kendala-kendala yang dihadapi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan pengembangan perkebunan kopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah terhadap pengembangan perkebunan kopi tahun 2015?
2. Apa saja factor yang memperngaruhi pelaksanaan kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap pengembangan perkebunan kopi di kabupaten Bener Meriah tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan factor yang memperngaruhi pelaksanaan kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap pengembangan perkebunan kopi di kabupaten Bener Meriah tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam pembuatan strategi kebijakan pemerintah untuk pengelolaan perkebunan kopi yang lebih baik.
2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan bisa melengkapi dan memperkaya kaidah-kaidah dan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengembangan perkebunan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suwandari dan Soetriono (2010), bahwa kebijakan pemerintah saat ini masih memberikan dampak yang negatif terhadap usaha tani kopi rakyat, yaitu kebijakan pemerintah terhadap input non tradable atau faktor domestic, tenaga kerja, lahan, dan modal, dimana harga privat yang dibayarkan oleh petani kopi lebih mahal dibandingkan dengan harga sosialnya, tetapi untuk kebijakan input dan output tradable yang ditetapkan pemerintah sudah memberikan dampak yang positif terhadap usahatani kopi rakyat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Jujur dan Afifuddin (2013), hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi kopi kawasan agropolitan Kabupaten Dairi telah dikonsepsi dengan baik dengan terwujudnya kawasan agropolitan Kabupaten Dairi sebagai salah satu pusat agribisnis di Indonesia yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan dan memajukan sistem dan usaha agribisnis yang berbasis tanaman pangan

hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan menuju pengelolaan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, program pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Dairi menjadi faktor penting yang mendukung pertanian dan industri kopi untuk memaksimalkan potensinya sebagai salah satu komoditas unggulan dan tulang punggung perekonomian Kabupaten Dairi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat alternatif strategi yang mendorong sinergitas antara pengembangan potensi kopi dengan program Kawasan Agropolitan Kabupaten Dairi.

Risandewi (2013), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi produksi rata-rata kopi robusta di Kecamatan Candiroto masih belum efisien yaitu sebesar 73,24%. Factor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat produksi kopi adalah luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah tanaman, penggunaan pupuk, dan umur tanaman. Untuk meningkatkan efisiensi produksi kopi perlu dilakukan intensifikasi lahan, mengurangi penggunaan pupuk yang berlebihan agar tidak mengganggu kesuburan lahan sesuai dengan ketentuan dari dinas pertanian, mengurangi jumlah tanaman kopi agar jarak tanaman tidak terlalu dekat, perlunya peremajaan tanaman kopi agar tingkat produksinya meningkat, mengurangi jumlah tenaga kerja yang tidak diperlukan agar tingkat produksinya optimal.

Table 1.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan	Teori	Keterangan
Anik Suwandari dan Soetriono (2010)	Analisa Kebijakan Kopi Rabusta dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Revalitas Perkebunan	Untuk mempelajari, meramalkan dan merumuskan kebijakan pemerintah dan daya saing komoditas kopi rabusta yang dilandasi dengan konsep daya saing three five	- Kebijakan - Daya Saing	Jenis penelitian surver deskriptif komparatif penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian serta menggunakan studi komparatif yang membandingkan antara dua variabel
Jujur T N Sitanggang dan Syaad Afifuddin Sembiring (2013)	Pengembangan potensi kopi sebagai Komoditas Unggulan kawasan argopolitan Kabupaten Dairi	Untuk mengetahui pengembangan potensi kopi sebagai komoditas unggulan kawasan argopolitan kabupaten Dairi	- Karakteristik Kopi - Pengembangan Kawasan Agropolitan	Jenis penelitian Purporsive Dalam penelitian ini sumber informasi yang digunakan selama proses penelitian diperoleh dari para pelaku (actors)/informan. Teknik yang digunakan dalam memilih informan sampling adalah dengan teknik purposivesampling, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Tri Risandewi (2013)	Analisis efisiensi produksi kopi rabusta di kabupaten Temanggung (studi kasus di kecamatan Candi roto)	Untuk mengetahui tingkat efisiensi produksi usaha perkebunan kopi rakyat di kecamatan candi roto	- Produksi - Efisiensi	Jenis penelitian kuantitatif Penelitian kuantitatif yang akan dilakukan adalah statistik non parametrik dengan menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dan statistik parametrik dengan menggunakan regresi.
----------------------	--	--	---------------------------	--

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, perbedaan tersebut dapat dilihat melalui, yaitu :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suwandari dan Soetriono difokuskan pada daya saing dan penguatan revitalisasi perkebunan untuk menjelaskan secara deskriptif kebijakan-kebijakan yang ada terhadap penguatan revitalisasi perkebunan, sedangkan pada penelitian Jujur dan affifuddin menjelaskan variable pengembangan potensi kopi sebagai komoditas unggulan kawasan argopolitan secara purposive yang digunakan untuk mengungkapkan atau menjelaskan pengembangan potensi kopi tersebut, dan Risandewi menjelaskan efisiensi produksi kopi rabusta secara statistik non parametrik dengan menggunakan alat analisis Data Envelopment

Analysis (DEA) dan statistik parametrik dengan menggunakan regresi untuk mengetahui tingkat efisiensi produksi kopi robusta.

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda dan metode yang saling melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis mengambil penelitian yang berbeda pula yaitu dengan mengkaji pelaksanaan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah terhadap pengembangan perkebunan kopi.

F. Kerangka Dasar Teori

Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, teori tentang variabel-variabel yang akan di gunakan dalam memberikan landasan teoritis dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda. Seperti yang dikatakan Federick (dalam Agustino, 2008: 7) Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide

kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Adapun jenis-jenis kebijakan publik menurut Nugroho (2003:54) dapat dibagi berdasarkan 3 hal berikut :

- 1) *Pertama* yaitu dari segi makna kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintahan untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan yang
- 2) *Kedua* adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.
- 3) *Ketiga* adalah karakter dari kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang tertulis formal. Disini, publik dibagi menjadi dua, yaitu: 1) *Regulative versus deregulatif*; atau *restriktif versus non-restriktif*; 2) *Alokasif versus distributive* atau *redistributive*.

Menurut Dunn (dalam Winarno, 2007: 32-34) siklus pembuat kebijakan ada 5 tahap yaitu, pertama ialah tahap penyusunan kebijakan,

kedua melalui formula kebijakan, ketiga berupa adopsi kebijakan, keempat tahapan implementasi, dan tahap terakhir adalah tahap penilaian atau evaluasi kebijakan, gambar tahap-tahap kebijakn dapat dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 1.4
Tahap-Tahap Kebijakan Menurut William Dunn

Penyusunan Kebijakan



Formulasi



Adopsi



Implementasi



Evaluasi

Sumber : Winarno (2007: 32-34)

1) Penyusunan Agenda

Pada tahap ini terdapat penentuan permasalahan mana yang akan dijadikan sebagai fokus masalah yang dianggap sangat penting untuk segera diselesaikan. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa alasan yang membuat para pembuat kebijakan harus menentukan prioritas terhadap suatu permasalahan.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah dijadikan prioritas kemudian didefinisikan oleh para pembuat kebijakan untuk kemudian mencari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Sehingga pada tahap formulasi ini, proses politik lebih dominan daripada aspek administratifnya.

3) Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu yang akan menjadi alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif. Pada tahap ini lebih bersifat proses menjadikan sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum, agar mempunyai daya ikat dan daya paksa.

4) Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi Pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya manusia dan finansial. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa mendapat

dukungan para pelaksana dan beberapa yang lain mungkin menentang.

5) Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mencapai tujuan yang telah diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan.

Dan hal terpenting dalam suatu kebijakan publik adalah proses implementasi dari kebijakan publik itu sendiri. Terdapat beberapa proses implementasi kebijakan publik (Purwanto, 2012: 72) yaitu:

- a) Kebijakan diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
- b) Keluaran kebijakan merupakan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- c) Pelaksana/implementer merupakan bagian penting dalam implementasi dari suatu kebijakan, apabila tidak ada pelaksana maka kebijakan yang telah dibuat tidak akan sampai pada tujuan dan sasaran.

- d) Kelompok sasaran merupakan sasaran pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat, karena terdapat permasalahan yang timbul sehingga membuat munculnya suatu kebijakan.
- e) Dampak dari kebijakan, dalam hal ini dampak dari suatu kebijakan ada yang bersifat dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang.
- f) Kinerja implementasi merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, baik itu kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.

Sebagaimana dikemukakan Wibawa (1994), kebijakan mempunyai tujuan menciptakan suatu kondisi di masa depan guna memuaskan kepentingan berbagai aktor, dan kondisi tersebut hanya akan terwujud bila pemerintah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki di barengi dengan manajemen implementasi yang baik. Setelah kebijakan yang terbaik di antara berbagai alternatif yang ada sudah terpilih, maka tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Implementasi Kebijakan Publik

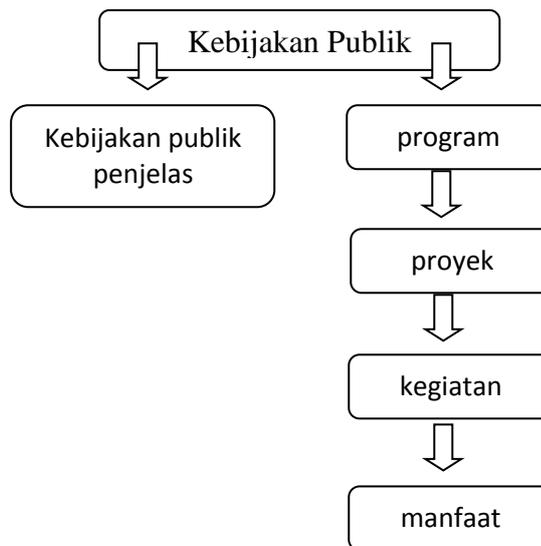
Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting yang menentukan apakah suatu kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya berhasil atau tidak, menurut Winarno (2007) kebijakan dapat diartikan sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Ada beberapa pendekatan dalam studi kebijakan publik, dan salah satunya adalah pendekatan kelembagaan. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah.

Sedangkan, menurut Agustino (2008: 138) studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi dirumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab, 2004: 54).

Menurut Nugroho (2003: 158-159) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuan. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang ada yaitu, langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai beriku :

Gambar 1.5
Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber : Nugroho (2003: 158-159)

Pada dasarnya implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Meter dan Horn dalam Winarno, 2007). Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan pemerintah menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha program dan kegitan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Dari definisi tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden, perintah presiden atau dekrit presiden. Dan dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Agustino (2008 : 139) yaitu :

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- 2) Aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Keberhasil implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Apakah kebijakan itu sesuai dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang telah di tetapkan. Banyak variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Banyak variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1) Model George C Edward III

Menurut Edward (dalam Winarno 2002: 125), ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni :

(1) Komunikasi

Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksana dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

(2) Sumber-sumber

Sumber-sumber yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Edwards meliputi :

- a. Staf; barangkali sumber yang penting dalam implementasi kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu memberikan efek positif bagi implementasi

kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

- b. Informasi; informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana yang perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak.
- c. Fasilitas-fasilitas; fasilitas fisik mungkin pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

(3) Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

(4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

2) Grindel

Menurut Grindel (dalam Wibawa 1994: 22-23) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat

kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten apa yang ada dalam isi suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Variabel konteks meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administrasi dengan kebijakan politik tersebut. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individu dan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

Variabel isi kebijakan (*Content Policy*) mencakup:

- a. sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- b. jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci,
- f. apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variable lingkungan kebijakan (*Contex Policy*) mencakup:

- a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. karakteristik institusi dan penguasa yang sedang berkuasa;
- c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3) Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian (dalam Subarsono 2006: 93-99), ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

- (1) karakteristik dari masalah;
- (2) karakteristik kebijakan dan
- (3) variable lingkungan.

Yang dimaksud karakteristik masalah adalah :

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Yang dimaksud karakteristik kebijakan adalah

- a. Kejelasan isi kebijakan
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan berbagai institusi pelaksana.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas akses kelompok–kelompok luar untuk berpartisipasi.

Yang dimaksud lingkungan kebijakan adalah :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- c. Sikap dari kelompok pemilih.
- d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat implementor

4) Van Horn dan Van Metter

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007), ada enam variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

b) Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan..

c) Komunikasi antar organisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

d) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program.

e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

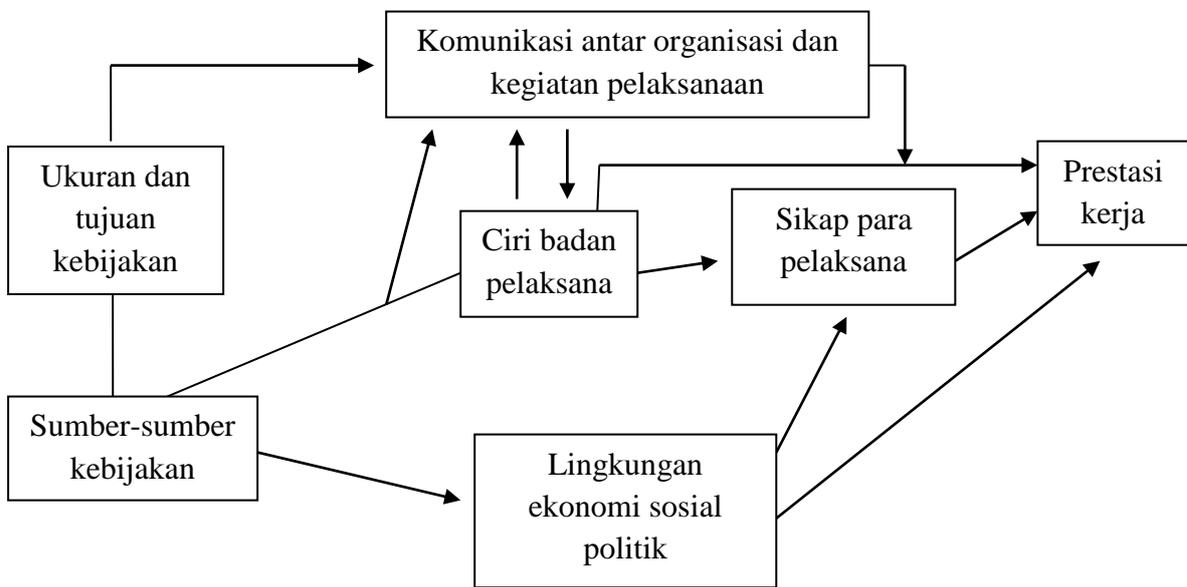
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memerlukan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan..

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Gambar 1.6
Model Implementasi Menurut Meter dan Horn



Sumber : Winarno (2007)

4. Pengembangan Perkebunan

Pengembangan sering diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik (Soekartawi, 1994: 1). Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditi tertentu. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan

dapat dibedakan menjadi perkebunan dengan tanaman musim, seperti perkebunan tembakau dan tebu, serta perkebunan tanaman tahunan, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi, cengkeh, dan pala. Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi 2 seperti yang dikemukakan oleh Syamsulbahri (1996) yaitu:

- 1) Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaan dalam skala yang terbatas luasnya.
- 2) Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum dikelola secara komersial dengan areal pengusahaan yang sangat luas. Perkebunan Besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.

1) Tahap-Tahap Pembangunan Pertanian

Menurut Todaro (2006) ada tiga pokok dalam evolusi produksi pembangunan pertanian sebagai berikut :

- a) Pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah
- b) Produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial atau pasar, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah
- c) Pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula.

Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial. Modernisasi pertanian dari tahap tradisional (subsisten) menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan kembali struktur ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian yang baru. Hampir semua masyarakat tradisional, pertanian bukanlah hanya sekedar kegiatan ekonomi saja, tetapi sudah merupakan bagian dari cara hidup mereka. Pemerintah yang berusaha mentransformasi pertanian tradisional haruslah menyadari bahwa pemahaman akan perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh sosial, politik dan kelembagaan masyarakat pedesaan adalah sangat penting. Tanpa adanya perubahan-perubahan seperti itu, pembangunan pertanian tidak akan pernah bisa berhasil seperti yang diharapkan.

2) Tujuan utama pembangunan perkebunan

Menurut Goenadi (2005) dalam Info Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, tujuan utama pembangunan pertanian adalah :

- 1) Menumbuh kembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Menumbuhkan industri hulu, hilir, dan penunjang dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian,

- 3) Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan,
- 4) Membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri dan
- 5) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukan devisa.

Pembinaan terhadap petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil pertanian diarahkan berfungsi sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan, bahan ekspor dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian bertujuan dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah (Cahyono, 2003)

G. Definisi Konseptual

1. Kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh satu pihak pemerintah atau swasta baik individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.
3. Pembangunan Perkebunan adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan sektor perkebunan yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

H. Definisi Operasional

Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah terhadap pengembangan perkebunan kopi, akan menganalisis data dengan menggunakan variabel dan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Dinas Perkebunan Terhadap Pengembangan Perkebunan Kopi
 - a. Tujuan dan sasaran kegiatan
Tujuan yang ingin dicapai dan siapa saja yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi
 - b. Aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
 - 1) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebuan
 - 2) Program peningkatan produksi perkebuan
 - c. Hasil kegiatan
Hasil pelaksanaan dari pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebuan kopi

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

- a. Standar dan sasaran : kejelasan ukuran dan tujuan dari kebijakan
- b. Sumberdaya : ketersediaan sumber daya dalam kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi : kerjasama organisasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program
- d. Karakteristik agen pelaksana : mencakup struktur birokrasi dan pola-pola hubungan
- e. Kondisi sosial ekonomi dan politik : sumberdaya lingkungan yang mendukung implementasi
- f. Sikap pelaksana (Diposisi) : meliputi sikap terhadap kebijakan dan sasaran kebijakan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Moleong (2012:06) dinyatakan bahwa ” Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan jenis dan sumbernya, yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini khususnya dari Dinas Perkebunan kabupaten Bener Meriah guna mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan yaitu :
 - 1) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah
 - 2) Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah
 - 3) Serta beberapa petani kopi Kabupaten Bener Meriah
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang yang berkaitan dan lain-lain yang dianggap perlu.

3. Unit Analisa

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis yang menjadi pokok penelitian adalah Dinas Perkebunan dengan kebijakannya dalam menyangkut pengembangan perkebunan kopi serta beberapa petani kopi.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara dan studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dari buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Teknik wawancara

Melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian. Berikut ini adalah daftar narasumber yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu :

Tabel 1.2
Daftar Narasumber Penelitian

No	Kelompok	Jumlah
1	SKPD	
	a. Sekretaris Dinas Perkebunana Kab. Bener Meriah	1
	b. Kabid Produksi, Pengembangan dan Pertanian Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah	1
	c. Kasubag Keuangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah	1
	d. Sub. Program Kab. Bener Meriah	1
2	NON-SKPD	
	a. Petani Kopi/ Perwakilan Petani Kopi	6
Total		10

b. Teknik Dokumentasi

Teknik ini di pergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-

dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang diperoleh dari Dinas Perkebunan kabupaten Bener Meriah

5. Teknik analisa data

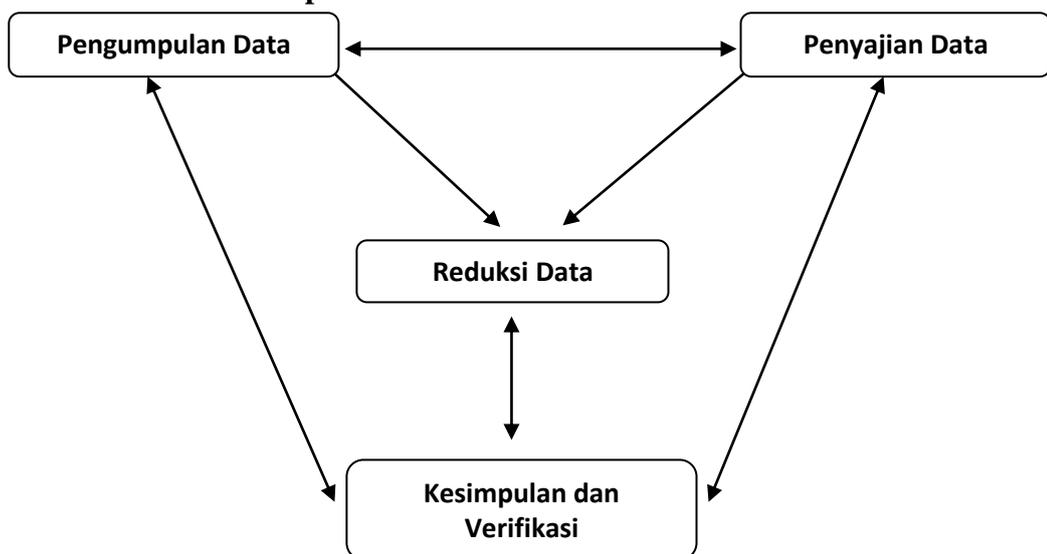
Menurut Bogdan dan Biklen (Moleng 2012:248) analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis (Salim, 2006: 20)

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c. Penyajian data, yaitu diskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar memperoleh kesimplan yang valid.

Gambar 1.7
Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Salim (2006: 20)